

# STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM REKONTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR DI KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA

Siti Nur Aisyah  
NPP. 32.0105

Asal Pendaftaran Kota Binjai , Provinsi Sumatera Utara  
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: [sitinaisyaaah@gmail.com](mailto:sitinaisyaaah@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: D. Adam Ismail, S.IP., M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Started from problems that occurred due to flood disaster in Binjai City which resulted in damage to facilities and infrastructure. So that post-disaster reconstruction is carried out. **Purpose:** to describe and analyze the inhibiting factors faced and the strategy of the Regional Disaster Management Agency of Binjai City in dealing with the problems faced in the implementation of reconstruction. **Method:** This study used qualitative research methods. The data in this study were collected through interviews, documentation and observation. SWOT analysis technique is used to reduce, present and conclude. **Result:** The results obtained from this study in dealing with the problems of the implementation of reconstruction in Binjai City, North Sumatra Province based on a study on the strategy of the Regional Disaster Management Agency of Binjai City in dealing with reconstruction problems have internal factors and external factors. In handling the problems faced by the implementation of reconstruction after the flood disaster, it is considered quite good even though there are obstacles in the form of a lack of budget, coordination between stakeholders who lack coordination, the many demands of the community and the culture of the people who reject the implementation of the reconstruction. **Conclusion:** The Regional Disaster Management Agency for Binjai City in dealing with the problems of the implementation of reconstruction has various strategies such as making policies and programs that are more specific and involving stakeholders in supporting policies and programs for implementing post-disaster reconstruction, increasing the active role of all parties and utilizing social media as a means of aid information social.

**Keywords:** Strategy, Regional Disaster Management Agency, Reconstruction

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini berawal dari masalah yang terjadi akibat bencana banjir di Kota Binjai yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana. Sehingga dilakukan rekontruksi pasca bencana. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang faktor penghambat yang dihadapi serta strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dalam menangani permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rekontruksi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis

SWOT digunakan untuk mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. **Hasil/Temuan:** Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dalam menangani permasalahan pelaksanaan rekontruksi di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara berdasarkan studi pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dalam menangani permasalahan rekontruksi memiliki faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penanganan masalah yang dihadapi pelaksanaan rekontruksi pasca bencana banjir dinilai sudah cukup baik meskipun ada hambatan berupa kurangnya anggaran, koordinasi antara stakeholder yang kurang berkoordinasi, banyaknya tuntutan masyarakat serta budaya masyarakat yang menolak pelaksanaan rekontruksi. **Kesimpulan:** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dalam menangani permasalahan pelaksanaan rekontruksi memiliki berbagai strategi seperti membuat kebijakan dan program yang lebih spesifik serta melibatkan stakeholder dalam mendukung kebijakan dan program pelaksanaan rekontruksi pasca bencana, meningkatkan peran aktif dari segala pihak serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi bantuan sosial.

**Kata kunci:** Strategi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rekontruksi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berada pada wilayah geografis rawan bencana, baik yang bersumber dari alam, non-alam, maupun sosial. Salah satu bencana alam yang paling sering terjadi dan berdampak besar terhadap masyarakat adalah banjir. Banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan gangguan sosial, tetapi juga berdampak serius terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan bencana, khususnya pada tahap pascabencana, menjadi krusial karena mencakup proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak (Pusat Pendidikan dan pelatihan sumber daya air dan kontruksi, 2017).

Kota Binjai, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan banjir yang tinggi. Letaknya yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bangkatan serta tingginya curah hujan membuat beberapa kecamatan di kota ini, seperti Binjai Kota, Binjai Selatan, dan Binjai Timur sering terdampak banjir. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, banjir telah menyebabkan kerusakan pada ribuan rumah, jembatan, jalan utama, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta memaksa ribuan warga untuk mengungsi. Selain itu, peristiwa banjir juga berdampak pada gangguan terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi warga.

Menghadapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan program rekonstruksi pascabencana. Namun, dalam pelaksanaannya, BPBD tidak luput dari berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta tekanan dan tuntutan dari masyarakat yang mengharapkan pemulihan cepat dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan terencana dalam proses rekonstruksi, tidak hanya untuk membangun kembali infrastruktur, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih tangguh terhadap bencana di masa depan.

### 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai penanggulangan bencana dan rekonstruksi pascabencana telah dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya oleh M. Naufal Qistan Khalik (2020) yang meneliti tentang “*Normalisasi Sungai dalam Rangka Pencegahan Banjir oleh Dinas PUPR di Kota Palembang*”. Penelitian tersebut menitikberatkan pada upaya teknis pencegahan banjir melalui normalisasi sungai dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun

memberikan kontribusi penting dalam aspek mitigasi bencana, penelitian tersebut belum secara mendalam membahas fase pascabencana, khususnya pada aspek strategi kelembagaan dalam proses rekonstruksi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, terdapat celah (gap) yang belum banyak dikaji, yakni bagaimana strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani rekonstruksi pascabencana banjir secara menyeluruh, khususnya di daerah rawan banjir seperti Kota Binjai, Sumatera Utara. Kota Binjai memiliki karakteristik geografis yang unik dan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap banjir berulang, yang membutuhkan pendekatan strategis berbasis analisis kelembagaan, sosial, serta sumber daya lokal.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti secara spesifik strategi BPBD Kota Binjai dalam menghadapi tantangan rekonstruksi pascabencana banjir. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis SWOT, penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan rekonstruksi, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana instansi daerah dapat merumuskan kebijakan pemulihan yang adaptif, efektif, dan partisipatif.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan 5 (lima) hasil penelitian sebelumnya yang memiliki topik berkaitan dan relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian Sari (2017) dari Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Sampang (Studi Kasus di BPBD Kabupaten Sampang)” menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Sampang melalui BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sudah sesuai dengan petunjuk Perka BNPB No.17 tahun 2010, akan tetapi dalam pelaksanaan programnya belum berjalan maksimal karena kurangnya koordinasi antar pemerintah kabupaten dan anggaran yang belum tercukupi. Penelitian Nehru (2017) dari Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Gunung Kelud di Desa Pandasari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang” menghasilkan bahwa peran BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki peran yang kecil, BPBD hanya sebagai fungsi koordinator dan pelaksana dari kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi dilaksanakan oleh SKPD terkait, sehingga berdampak kepada peran dari BPBD dalam menjalankan pengkajian kebutuhan pasca bencana karena tidak adanya legalitas yang jelas. Penelitian Pratama (2018) dari Universitas Andalas yang berjudul “Permasalahan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun 2009 di Sumatera Barat” menghasilkan bahwa permasalahan yang ada, yaitu fasilitator tidak bekerja secara maksimal, tidak adanya evaluasi hasil dari pelaksanaan rekonstruksi, masyarakat yang dinilai kurang patuh, sumber daya finansial yang tidak cukup dan membutuhkan waktu yang lama. Penelitian Soviandi (2018) dari Universitas Andalas yang berjudul “Analisa Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Permasalahan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Tsunami Tahun 2010 di Kabupaten Kepulauan Mentawai” menghasilkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap rekonstruksi rumah pasca bencana tsunami tahun 2010 di Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada kondisi rata-rata (cukup puas). Penelitian Wibowo (2018) dari STIEWW yang berjudul “Strategi Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan dalam Penanggulangan Bencana” menghasilkan bahwa strategi yang dilakukan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kerja sama tim dengan pihak-pihak lain, memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya, meningkatkan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana, meningkatkan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, menambah jumlah Tim Reaksi Cepat.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajian strategi rekonstruksi pascabencana banjir dengan fokus pada peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai sebagai aktor utama dalam penanganan pascabencana di tingkat daerah. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek teknis mitigasi atau respons bencana, penelitian ini menelaah secara mendalam aspek manajerial dan kelembagaan dalam proses rekonstruksi, termasuk faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan strategi yang dijalankan (Labolo, 2011).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis SWOT, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dalam merumuskan strategi rekonstruksi yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis evaluasi kelembagaan lokal. Kebaruan lain terletak pada konteks wilayah yang diteliti, yaitu Kota Binjai, yang belum banyak dijadikan objek kajian akademik meskipun memiliki tingkat kerentanan banjir yang tinggi dan kompleksitas sosial yang khas. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur di bidang manajemen bencana, tetapi juga menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan rekonstruksi yang lebih adaptif dan terarah, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi BPBD Kota Binjai dalam rekonstruksi pascabencana banjir, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai dalam pelaksanaan rekonstruksi pascabencana banjir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat BPBD dan masyarakat terdampak, observasi langsung di lokasi banjir, serta studi dokumentasi terhadap data resmi dan arsip pendukung (Robert K. Yin, 2018). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2014). Selain itu, analisis SWOT diterapkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi strategi BPBD (Wiratna, 2015). Pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan gambaran strategis yang aplikatif dan kontekstual bagi penguatan kebijakan rekonstruksi di tingkat daerah (Sugiyono, 2013).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menganalisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kota Binjai dengan menggunakan pendapat Rangkuti (2006) yang menyatakan bahwa strategi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, strategi yang dikemukakan oleh Rangkuti dengan menggunakan analisis SWOT yang merupakan rangkaian analisis terhadap adanya faktor-faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada organisasi/perusahaan yang kemudian juga memperhatikan faktor-faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang mempengaruhi.

### **3.1 Faktor Internal dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi**

#### **3.1.1 Faktor Kekuatan (Strengths) dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi**

##### **3.1.1.1 Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana**

Salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan rekonstruksi pascabencana di Kota Binjai adalah adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah yang dituangkan secara sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD dan mengacu pada RPJMD Kota Binjai. Kebijakan ini tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga paduan operasional yang antipatif dan strategis, mencakup perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan (Penanggulangan Bencana, 2007). Dukungan ini memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat respons lembaga dalam situasi darurat maupun masa pemulihan. Strategi dan kebijakan yang dirancang, seperti penguatan ketahanan bencana, kolaborasi pentahelix, serta pembentukan UPTD informasi kebencanaan, menunjukkan komitmen daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan berkelanjutan (BPK, 2008), serta disusun melalui partisipatif aktif seluruh unsur organisasi untuk menghasilkan program yang aplikatif dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2010).

##### **3.1.1.2 Komitmen Badan Pelaksana dalam Penanganan Masalah Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana**

Komitmen BPBD Kota Binjai menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan rekonstruksi pascabencana. Hal ini tercermin dari keseriusan lembaga dalam setiap tahap, mulai perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Dalam wawancara pada 13 Januari 2025 pukul 14.35 WIB, Kepala BPBD Rudi Iskandar, S.T, menjelaskan bahwa koordinasi yang baik, baik secara vertikal maupun horizontal, mempercepat pengambilan keputusan dan distribusi bantuan. Senada dengan itu, Amru Zuhri Harahap, S.T, M.A.P, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyampaikan bahwa BPBD juga menugaskan anggota khusus untuk pendataan kerusakan serta aktif berkoordinasi dengan instansi terkait. Komitmen ini ditunjukkan melalui pembentukan Tim Kaji Cepat dan kerja sama lintas sektor, yang menjadikan pelaksanaan rekonstruksi lebih terstruktur dan berkelanjutan.

##### **3.1.1.3 Sistem manajemen yang Baik dalam Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana**

Sistem manajemen yang baik dan terorganisir menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung keberhasilan rekonstruksi pascabencana di Kota Binjai. Dalam wawancara pada 13 Januari 2025 pukul 08.45 WIB, Kepala Tim Lingkup Rekonstruksi BPBD, Ibnu Akbar, S.E, menyampaikan bahwa manajemen dijalankan secara terstruktur mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan pedoman operasional yang jelas dan sesuai regulasi. Pengawasan internal dan pelaporan rutin juga dilakukan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Sistem ini tidak hanya memperlancar pelaksanaan program, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap BPBD.

#### **3.1.2 Faktor Kelemahan (Weakness) dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi**

##### **3.1.2.1 Anggaran dalam Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana**

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan rekonstruksi pascabencana di Kota Binjai. Berdasarkan wawancara pada 13 Januari 2025, Kepala BPBD Rudi Iskandar, S.T, menjelaskan bahwa anggaran rekonstruksi disusun berdasarkan RPJMD dan proposal kebutuhan pascabencana, namun seringkali tidak mencukupi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibnu Akbar, S.E, selaku Kepala Tim Lingkup Rekonstruksi, yang menyebutkan bahwa sifat bencana yang tidak terduga membuat alokasi dana dalam perencanaan belum mampu

mengakomodasikan kebutuhan riil. Meskipun BPBD mengajukan tambahan dana ke pemerintah daerah, keterbatasan anggaran tetap menghambat pemulihan infrastuktur secara menyeluruh.

### **3.1.2.2 Koordinasi dengan Stakeholder Terkait Untuk Persamaan Persepsi dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana**

Koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan rekonstruksi pascabencana di Kota Binjai. BPBD berupaya menyusun rencana kerja bersama dengan berbagai stakeholder guna menciptakan sinergi yang berkelanjutan. Namun, dalam wawancara pada 13 Januari 2025, Kepala BPBD Rudi Iskandar, S.T, mengakui bahwa koordinasi, khususnya dalam penanganan banjir, masih belum optimal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibnu Akbar, S.E, selaku Kepala Tim Lingkup Rekonstruksi, yang menekankan perlunya komunikasi berkelanjutan melalui forum koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi yang lebih intensif dan terstruktur agar pelaksanaan rekonstruksi berjalan efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan rencana bersama.

## **3.2 Faktor Eksternal dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana**

### **3.2.1 Faktor Peluang (Oppurtunities) dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi**

#### **3.2.1.1 Dukungan Stakeholder dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana**

Keterlibatan berbagai stakeholder menjadi elemen penting dalam pelaksanaan rekonstruksi pascabencana di Kota Binjai. Instansi seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Tim Kaji Cepat, Dinas Perumahan, aparat kecamatan, hingga masyarakat terdampak turut berperan aktif dalam mendukung proses rekonstruksi. Dalam wawancara pada 13 Januari 2025, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Amru Zuhri Harahap, S.T, M.A.P, menyatakan bahwa BPBD berperan sebagai koordinator utama dalam seluruh tahapan, dengan dukungan solid dari stakeholder yang terlibat. Koordinasi yang intens dan komunikasi yang baik menjadi kunci kelancaran pemulihan pascabencana. Dengan demikian, sinergi antar instansi dan komitmen bersama menjadi fondasi penting bagi terwujudnya rekonstruksi yang efektif dan berkelanjutan

#### **3.2.1.2 Media Sosial yang Membantu dalam Penanganan Masalah Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Bencana**

Media sosial menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung pelaksanaan rekonstruksi pascabencana di Kota Binjai. Melalui platform seperti whatsApp, Facebook, dan Instagram, informasi mengenai kondisi pascabencana dan tahapan rekonstruksi dapat disampaikan secara cepat dan transparan kepada masyarakat dan instansi terkait. Dalam wawancara pada 13 Januari 2025, Kepala BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar, S.T, menyatakan bahwa media sosial tidak hanya digunakan untuk komunikasi internal, tetapi juga untuk edukasi, peringatan dini, serta menampung laporan warga terdampak. Dengan pengelolaan yang baik, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta stakeholder dalam mewujudkan pemulihan yang tangguh.

### **3.2.2 Faktor Ancaman (Threats) Dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana**

#### **3.2.2.1 Kurangnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Proses Rekonstruksi**

Proses rekonstruksi pascabencana sejatinya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, bukan semata-mata beban lembaga atau instansi tertentu. Keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan dalam setiap tahapan, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Namun demikian, realitas di Kota Binjai menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar S.T, dalam wawancara pada Selasa, 13 Januari 2025 pukul 14:35 WIB. Ia menyatakan bahwa BPBD sebenarnya terbuka terhadap pelibatan masyarakat dalam seluruh proses rekonstruksi, namun banyak warga masih beranggapan bahwa penanganan pascabencana sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Sikap pasif ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya partisipasi, trauma pascabencana, serta sikap pasrah yang melekat kuat di kalangan korban. Akibatnya, program-program yang dijalankan menjadi kurang tepat sasaran dan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik warga terdampak. Ketidaklibatan masyarakat juga berdampak pada lemahnya rasa kepemilikan terhadap hasil rekonstruksi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberlangsungan dan efektivitas program jangka panjang. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk menumbuhkan partisipasi aktif dan mendorong kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga dalam proses pemulihan pascabencana.

### **3.2.2.2 Kurangnya Kepedulian Generasi Muda Terhadap Penanggulangan Bencana**

Minimnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan penanggulangan dan rekonstruksi pascabencana menjadi salah satu tantangan signifikan yang dihadapi BPBD Kota Binjai. Peran pemuda sejatinya sangat penting, tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong kesadaran masyarakat luas terhadap pentingnya mitigasi bencana. Sayangnya, hingga saat ini partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan seperti simulasi evakuasi, sosialisasi kebencanaan, dan pemulihan pascabencana masih tergolong rendah. Dalam wawancara yang dilakukan pada Selasa, 13 Januari 2025 pukul 14.35 WIB, Kepala BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar, S.T, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengharapkan keterlibatan pemuda, terutama dalam menyebarkan edukasi dan informasi kebencanaan ke masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa hanya sedikit anak muda yang benar-benar terlibat. Padahal peran mereka sangat strategis dalam mendukung keberlanjutan dan keberhasilan program mitigasi maupun rekonstruksi, terutama karena mereka memiliki kapasitas untuk menjangkau komunitas secara lebih luas dan cepat, khususnya melalui pemanfaatan teknologi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari BPBD untuk mendekati diri kepada komunitas pemuda, misalnya melalui pendekatan berbasis sekolah, organisasi kepemudaan, maupun platform digital. Dengan membangun kesadaran dan memberikan ruang keterlibatan yang nyata, generasi muda dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Keterlibatan mereka secara aktif juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan budaya siaga bencana yang lebih kuat di masa mendatang.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai dalam pelaksanaan rekonstruksi pascabencana banjir, menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah memiliki landasan strategi yang cukup baik, namun tetap menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi internal maupun eksternal. Temuan ini memiliki keterkaitan dan kontras yang signifikan dengan beberapa penelitian sebelumnya, baik dalam konteks strategi kelembagaan, peran masyarakat, maupun aspek teknis pelaksanaan rekonstruksi.

Sama halnya dengan temuan Sari (2017) mengenai BPBD Kabupaten Sampang, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dukungan kebijakan dan dokumen perencanaan seperti RPJMD serta Renstra menjadi kekuatan utama dalam mendasari pelaksanaan rekonstruksi. Kebijakan tersebut menjadi pemandu arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan

membentuk kerangka kerja institusional yang kuat. Namun, berbeda dengan penelitian Sari yang menyebutkan lemahnya koordinasi lintas sektor, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun koordinasi belum maksimal, BPBD Kota Binjai setidaknya telah melakukan langkah-langkah strategis seperti pembentukan Tim Kaji Cepat dan pelibatan lintas sektor, yang menjadi indikator komitmen kelembagaan yang lebih aktif.

Temuan ini juga memperkuat penelitian Wibowo (2018) yang menekankan pentingnya peningkatan kerja sama dan komunikasi antarlembaga dalam rangka penanggulangan bencana. Strategi peningkatan kinerja yang dilakukan oleh BPBD Pacitan juga tercermin di BPBD Kota Binjai melalui pemanfaatan media sosial dan sistem manajemen internal yang terstruktur. Namun, jika dibandingkan, BPBD Kota Binjai lebih progresif dalam menggunakan media sosial sebagai alat penyebaran informasi dan edukasi masyarakat secara real-time.

Berbeda dengan penelitian Pratama (2018) yang menemukan lemahnya evaluasi dan partisipasi masyarakat dalam rekonstruksi pascabencana gempa Sumatera Barat, penelitian ini menemukan bahwa meskipun partisipasi masyarakat di Kota Binjai masih tergolong rendah, BPBD telah berupaya membuka ruang partisipatif melalui penyebaran informasi terbuka, edukasi kebencanaan, serta pelibatan komunitas lokal. Sayangnya, resistensi budaya lokal serta anggapan bahwa rekonstruksi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah menyebabkan upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal.

Temuan ini juga menolak sebagian hasil penelitian Nehru (2017) yang menyebutkan bahwa peran BPBD Kabupaten Malang hanya sebagai koordinator pasif tanpa legitimasi kuat. Di Kota Binjai, BPBD justru tampil sebagai aktor utama dengan legitimasi yang jelas dan tanggung jawab teknis maupun administratif yang nyata dalam pelaksanaan rekonstruksi. Bahkan, BPBD Kota Binjai memiliki peran dominan dalam perencanaan, koordinasi lintas instansi, serta pengawasan pelaksanaan program.

Dari sisi tantangan eksternal, hasil penelitian ini mengungkap bahwa keterlibatan generasi muda dalam penanggulangan bencana masih sangat rendah. Hal ini sejalan dengan studi Soviandi (2018) tentang rekonstruksi pasca tsunami di Mentawai, yang menunjukkan rendahnya kepuasan masyarakat karena kurangnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan rekonstruksi. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan keterlibatan pemuda sebagai elemen strategis dalam menciptakan ketahanan bencana yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi BPBD Kota Binjai dalam pelaksanaan rekonstruksi pascabencana memiliki kekuatan utama dalam aspek kelembagaan dan manajerial, namun masih menghadapi tantangan besar dalam aspek partisipasi masyarakat dan ketahanan fiskal. Temuan ini memperkuat pentingnya rekonstruksi berbasis kelembagaan yang adaptif dan partisipatif seperti yang telah ditekankan oleh David (2011) dalam konsep manajemen strategis.

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Peneliti menemukan bagaimana peran informal komunitas lokal turut memengaruhi proses rekonstruksi pascabencana, meskipun tidak tercatat secara formal dalam struktur kelembagaan BPBD. Dalam beberapa kasus yang diamati, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta kelompok relawan lokal berperan aktif dalam mengoordinasikan distribusi bantuan, menyediakan informasi awal tentang wilayah terdampak, serta membantu mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat sebelum intervensi pemerintah dilakukan (Sutiyo dan Eviany, 1967). Peran komunitas ini menunjukkan adanya potensi besar dalam penguatan rekonstruksi berbasis komunitas (*community-based recovery*), yang selama ini belum secara eksplisit diakomodasi dalam kerangka kerja formal BPBD.

Penelitian ini juga menemukan bahwa teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pengambilan keputusan berbasis data (Suradinata, 1998). Meski media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi, namun belum ada sistem informasi terpadu yang mampu mengintegrasikan data kerusakan, kebutuhan masyarakat, lokasi terdampak, dan progres rekonstruksi secara real-time (Rohmat, 2003). Hal ini membuat proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi menjadi lebih lambat dan rentan terhadap ketidaktepatan sasaran (Hutabarat, Jemsley & Martani, 2006). Pengembangan sistem informasi kebencanaan yang lebih interaktif dan terintegrasi dapat menjadi inovasi penting yang mendukung efektivitas rekonstruksi. aspek menarik lainnya adalah ketergantungan terhadap bantuan eksternal, seperti dari provinsi maupun pusat, masih sangat tinggi (Orefice, S., & Innocenti, 2024). Meskipun BPBD Kota Binjai menunjukkan komitmen dan kesiapan internal, ketiadaan dana darurat yang memadai di tingkat daerah menghambat pelaksanaan rekonstruksi secara cepat. Ketergantungan ini memperlihatkan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah serta pembentukan dana kontinjensi bencana yang bisa segera digunakan saat kondisi darurat, tanpa harus melalui proses panjang (Koswara, 2002).

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai dalam mengatasi kendala pelaksanaan rekonstruksi pascabencana mencakup perencanaan program yang terarah dan responsif terhadap kondisi di lapangan, penyusunan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemulihan, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi publik yang efektif. BPBD juga terus berupaya meningkatkan partisipasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, guna mendukung proses rekonstruksi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat utama dalam pelaksanaan rekonstruksi, antara lain terbatasnya ketersediaan anggaran untuk membiayai seluruh kebutuhan pemulihan, lemahnya koordinasi lintas sektor yang berperan dalam proses rekonstruksi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta resistensi terhadap program relokasi ke wilayah yang lebih aman. Tuntutan masyarakat yang belum seluruhnya terpenuhi juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemulihan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BPBD Kota Binjai melakukan penguatan koordinasi dengan instansi terkait, mengoptimalkan peran Tim Kaji Cepat dalam pendataan dan verifikasi kerusakan, serta mengajukan dukungan anggaran tambahan kepada pemerintah provinsi maupun pusat. Selain itu, BPBD juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memanfaatkan media sosial secara maksimal guna mempercepat respons serta memperlancar proses rekonstruksi di wilayah terdampak.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori strategi menurut Rangkuti.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih kurangnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dalam rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kota Binjai untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPBD beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2010, November 29). *Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi*. <https://peraturan.go.id/id/peraturan-bnpb-no-17-tahun-2010>
- BPK. (2008). *Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4833>
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th Edition*. SAGE Publications. <https://study.sagepub.com/creswellrd4e>
- David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concept and Cases*. Salemba Empat. [https://pracownik.kul.pl/files/12439/public/3\\_David.pdf](https://pracownik.kul.pl/files/12439/public/3_David.pdf)
- Hutabarat, Jemsley & Martani, H. (2006). *Manajemen Strategis Kontemporer* (PT Elex Media Komputindo (ed.)). [https://www.researchgate.net/publication/362707263\\_Manajemen\\_Strategi\\_Kontemporer](https://www.researchgate.net/publication/362707263_Manajemen_Strategi_Kontemporer)
- Ikhwan, E. E & Widiyanto, H. W. (2023). Landslide Mitigation Through Resettlement In Wukirsari Village Imogiri Sub-District Bantul Regency. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(3), 1–2. <https://journal.student.uny.ac.id/joppar/article/view/21197/18810>
- Koswara, E. (2002). *Otonomi Daerah Untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat*. Candi Cipta Piramida. [https://catalog.umj.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=51850](https://catalog.umj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=51850)
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Rajawali. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/799/>
- Nehru, A. (2017). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Erupsi Gunung Kelud di Desa Pandasari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang*. [http://eprints.ipdn.ac.id/9136/1/Jurnal\\_Skripsi\\_Favian\\_fix.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/9136/1/Jurnal_Skripsi_Favian_fix.pdf)
- Orefice, S., & Innocenti, C. (2024). Regional assessment of coastal landslide susceptibility in Liguria, Northern Italy, using MaxEnt. *Natural Hazards*, May, 11069, <https://doi.org/10.1007/s11069-024-06833-5>
- Penanggulangan Bencana. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>
- Pratama, W. H. (2018). Permasalahan Rekontruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun 2009 di Sumatera Barat. *E-Skripsi Universitas Andalas*. <http://scholar.unand.ac.id/39299/>
- Pusat Pendidikan dan pelatihan sumber daya air dan kontruksi. (2017). Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir 2017. *Pusat*

*Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi.*

- Rangkuti, F. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. PT. Gramedia Pustaka Utama. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=27817>
- Robert K. Yin. (2018). Case Study Research and Applications. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Rohmat, D. J. (2003). Manajemen Strategik Edisi Pertama. In *UMM PRESS*. <https://lms.umm.ac.id/course/view.php?id=61746&section=1>
- Sari, D. A. (2017). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Sampang (Studi Kasus di Kabupaten Sampang)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://onesearch.id/Record/IOS4109.35917>
- Soviandi, E. (2018). Analisa Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Permasalahan Rekontruksi Rumah Pasca Bencana Tsunami Tahun 2010 di Kabupaten Mentawai. In *Skripsi. Universitas Andalas*. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/39605>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. [https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=43](https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43)
- Suradinata, E. (1998). *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi*. CV Ramadhan. <http://lib.lemhannas.go.id/opac/detailopac/1125>
- Sutiyo dan Eviany. (1967). Perlindungan Masyarakat. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).
- Wibowo, A. M. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan Dalam Penanggulangan Bencana. In *Tesis. STIE Widya Wiwaha*. <http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/315>
- Wiratna, S. (2015). Metode Penelitian bisnis & ekonomi. In *Pustaka baru press*. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=7457191351794043266&hl=en&oi=scholar>